



**LAPORAN PELAKSANAAN
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN – DPR RI
VIRTUAL TELECONFERENCE
INDONESIA-AFGHANISTAN WOMEN PARLIAMENTARIANS
“EMPOWERING WOMEN AND SUPPORTING PEACE PROCESS”**

JAKARTA, 23 JUNI 2021

I. PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang mengalami fase krusial dimana berbagai negara sedang berjuang menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Secara spesifik, terdapat negara yang juga sedang mengalami krisis keamanan dan instabilitas sosial politik seperti Afghanistan. Afghanistan, selain menghadapi Covid-19 juga sedang dalam proses perundingan dengan kelompok Taliban untuk menciptakan perdamaian dan keamanan nasional. Persoalan instabilitas di Afghanistan menjadi konsen negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia.

Relasi anggota parlemen perempuan Indonesia-Afghanistan merupakan suatu jaringan yang menjadi pintu masuk untuk meningkatkan hubungan kedua negara terutama dalam proses perdamaian. Perempuan diharapkan menjadi solusi bagi proses perdamaian dan berbagai proses pembangunan terutama di Afghanistan. Teleconference ini mengambil tema "*Empowering Women and Supporting Peace Process*". Dengan tema ini, diharapkan kedua negara dapat berbagai pengetahuan, pengalaman, dan komitmen untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di Afghanistan dan meningkatkan peran perempuan dalam proses itu.

A. Tujuan Acara

Acara ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman kedua negara dalam meningkatkan peran perempuan dalam rangka menciptakan perdamaian terutama di Afghanistan
2. Mendiskusikan upaya-upaya memperkuat perempuan dan meningkatkan perannya dalam mendukung proses perdamaian.
3. Mempererat hubungan khususnya antara parlemen perempuan Indonesia - Afghanistan.

B. Peserta

Acara ini dihadiri oleh delegasi dari : 1) Anggota Parlemen Perempuan Afghanistan (Woles Jirga); 2) Anggota Parlemen Perempuan Indonesia yang juga sebagai Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen Indonesia (BKSAP); 3) Anggota Kaukus Parlemen Perempuan Afghanistan.

| No | Nama | Fraksi | Jabatan | Komisi |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng | F-PKS/A-422 | Moderator/ Wakil Ketua BKSAP | II |
| 2 | Dr. Fadli Zon | F- P.Gerindra/ A-86 | Ketua BKSAP | I |
| 3 | Dr. Sihar Sitorus | F-PDIP/A- 139 | Wakil Ketua BKSAP | XI |
| 4 | Dr. Sodik Mudjahid | F- P.Gerindra/ A-80 | Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Afghanistan | II |
| 5 | Irine Yusiana Roba Puteri, S.Sos, MCOMN&MEDIAS | F-PDIP/A- 262 | Narasumber /Anggota BKSAP/ <i>Ambassador of Indonesia in Women Political Leaders (WPL)</i> | I |
| 6 | Puteri Anetta Komarudin, B.Com | F-PG/A-295 | Anggota BKSAP | XI |
| 7 | Dyah Roro Esti Widya Putri, WP, BA, M.Sc | F-PG/A-322 | Anggota BKSAP | VII |
| 8 | Katherine Anggela Oendoen | F- P.Gerindra/ A-123) | Anggota BKSAP | VII |
| 9 | Ir. Andi Yuliani Paris, M.Sc | F-PAN/A-517 | Anggota BKSAP | VII |
| 10 | Ema Ummyatul Chusnah | F-PPP/A-471 | Anggota BKSAP | IV |
| 11 | Ir. Ridwan Bae | F-PG/A-345 | Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Afghanistan | V |

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dari Ruang BKSAP Gedung Nusantara III Lt.6 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

| WAKTU | AKTIVITAS | KETERANGAN |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.00 | Opening the Teleconference by Moderator | Moderator : Hon. Mardani Ali Sera (Vice Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation) |
| 14.00 – 14.10 | National Anthem of Indonesia and Afghanistan | |
| 14.10 – 14.15 | Quran Recitation | By : Hon. Halima Sadaf Karimi |
| 14.15 – 14.20 | Opening speech by the Speaker of Indonesian House | H.E. DR. (HC) Puan Maharani |
| 14.20 – 14.25 | Welcome Remark by the Speaker of Woles Jirga | H.E. Mir Rahman Rahmani |
| 14.25 – 14.35 | Opening Remark by Co-Chair of the Afghanistan and Indonesia Women Networks and Minister of Women Affairs of Afghanistan | H.E. Hassina Safi |
| 14.35 – 14.40 | Remarks by the Chairperson of the Committee for Inter-parliamentary Cooperation | Hon. Dr. Fadli Zon |
| 14.40 – 14.45 | Remark by the Chairperson of the Afghanistan-Indonesia Parliamentary Friendship Group / Afghanistan MP | Hon. Halima Sadaf Karimi |
| 14.45 – 14.50 | Remarks by the Chairperson of Indonesia – Afghanistan Parliamentary Friendship Group | Hon. Dr. Sodik Mudjahid |
| 14.50 – 14.55 | Remarks by the Chairperson of Afghanistan's Women Parliament Caucus | Hon. Shinkai Karokhail |
| 14.55 – 15.00 | Keynote speech on <i>"Indonesia's experience in Empowering Women and Their commitment in supporting the peace process in Afghanistan and particularly Preserving Women Rights"</i> | Hon. Irene Yusiana Roba Puteri (Member of CIPC and Ambassador of Indonesia in Women Political Leader) |

| | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 15.00 – 15.05 | Keynote speech on “ <i>Role of Afghan Women in Process of Peace Making, Peace building and Sustainable Peace</i> ” | Hon. Naheed Farid (Chairwoman) |
| 15.05 – 15.30 | Open Discussion | |
| 15.30 | Closing & Foto Session | |

B. PELAKSANAAN ACARA

a. Pembukaan (Dr. Mardani Ali Sera)

Acara ini secara langsung dibuka dan dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP yaitu Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng. Moderator menyampaikan bahwa kegiatan teleconference ini merupakan sebuah tindak lanjut dari pertemuan awal antara dengan delegasi parlemen perempuan pada November 2019 yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara Indonesia-Afghanistan *Women Solidarity Networks* pada bulan Maret 2020. Kedua pertemuan tersebut membuka jalan bagi penguatan komitmen dan kerjasama antara anggota parlemen Indonesia dan Afghanistan. Dr. Mardani menegaskan kembali komitmen anggota parlemen Indonesia dalam mendukung proses penguatan isu keamanan dan proses pembangunan di Afghanistan. Hal tersebut ditunjukkan oleh pendirian pusat agama islam (Islamic Center) di Kabul yang terdiri dari masjid, pusat kesehatan, dan berbagai fasilitas lainnya. Afghanistan dan

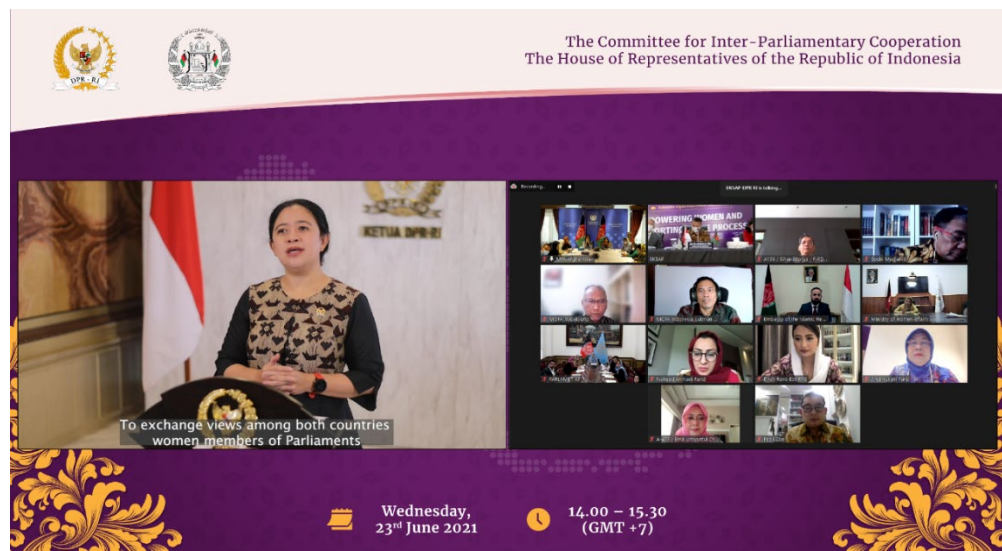


Indonesia merupakan negara muslim demokrasi terbesar dunia yang menjunjung tinggi multikulturalisme sebagai suatu modal sosial. Indonesia dan Afghanistan diharapkan dapat meningkatkan memperkuat upaya untuk kerjasama dan dialog antar budaya di kawasan.

Sebagai pembukaan, acara ini diawali dengan serangkaian pernyataan pembuka (*opening remarks*), oleh :

1. Ketua DPR RI (H.E. Dr. (HC) Puan Maharani)

Isu pemberdayaan perempuan selalu menjadi isu penting yang diperjuangkan oleh Indonesia. Indonesia memiliki pengalaman yang panjang dalam mempromosikan perempuan sebagai pemimpin. Pada tahun 2001, Indonesia memiliki presiden perempuan pertama yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri setelah menjadi wakil presiden sejak tahun 1999. Kesetaraan gender merupakan isu semua orang dan bukan hanya kepentingan perempuan.



Terdapat tiga faktor yang menjadi penentu dalam pemberdayaan perempuan, yaitu **pertama** pendidikan. Pendidikan merupakan sektor yang menjadi penentu bagi pemberdayaan perempuan. Pendidikan merupakan sarana bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitasnya dan mengetahui tentang hak-haknya sebagai perempuan. Pendidikan akan memberikan peluang bagi perempuan untuk meraih mimpi-mimpinya. Faktor **kedua** adalah dukungan dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan komunitas sekitar. Faktor **ketiga** adalah peran parlemen yang bisa mengatur ketentuan minimal perempuan untuk terlibat dalam komitmen politik. Parlemen mempunyai kekuasaan untuk mengarusutamakan kesetaraan gender di berbagai kebijakan pemerintahan.

Indonesia akan terus berkomitmen untuk memberikan *support* terhadap proses perdamaian, rekonsiliasi dan proses pembangunan di Afghanistan. Dalam upaya ini, perempuan memiliki peran yang signifikan dalam berbagai proses peningkatan stabilitas meskipun masih belum sepenuhnya diperhatikan. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, maka dibutuhkan pendekatan komprehensif dimana perempuan menjadi aktor yang terlibat dalam proses perdamaian. Perempuan memiliki kekuatan untuk menebarkan spirit perdamaian di kalangan generasi muda.

2. Ketua Parlemen Afghanistan/Woles Jirga (H.E. Mir Rahman Rahmini)

Republik Indonesia dan Republik Islam Afghanistan memiliki hubungan yang erat lebih dari setengah abad. Hubungan budaya, agama, dan sejarah mempereta relasi antar kedua negara. Masyarakat dan pemerintah Afghanistan saat ini sedang menghadapi dua fenomena yang berbahaya yaitu **pertama**, adanya kelompok ekstrimis domestik yang muncul sejak penarikan pasukan internasional. Penghentian kekerasan, pembunuhan, dan serangan terhadap institusi publik pemerintah dan non pemerintah merupakan konsen utama pemerintah Afghanistan.



Kedua, adanya pandemi Covid-19 yang masih merajalela dan tidak terkontrol. Kurangnya fasilitas dan peralatan menjadi kendala utama dalam penanganan tersebut. Kami berharap bisa menangani persoalan ini dengan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dan komunitas internasional.

Terkait peningkatan keamanan, solusi politik sudah ditempuh sejak beberapa bulan yang lalu melalui perundingan antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban. Namun demikian, proses ini terhenti dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan oleh Taliban yang kemungkinan ragu dengan perundingan perdamaian ini. Taliban telah mengajukan beberapa prasyarat untuk dimulainya perundingan tetapi mereka tidak punya rencana yang jelas dalam hal rekonsiliasi ini. Kemungkinan lain adalah ketidakpercayaan kelompok Taliban terhadap proses-proses politik di pemerintahan. Jika perundingan ini gagal maka, ini tidak hanya menjadi ancaman bagi Afghanistan tapi juga menjadi ancaman keamanan di tingkat regional.

Pada saat yang sama, keterlibatan perempuan dalam politik di Afghanistan semakin signifikan. Sistem politik telah menjamin hak-hak politik perempuan melalui kebijakan afirmatif perempuan untuk menjadi anggota parlemen. Selain itu, perempuan juga memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengikuti proses-proses pendidikan. Dalam hal ini, support dari Indonesia sangat patut diapresiasi sehingga kedepannya perempuan dapat mengisi pos-pos penting di jabatan publik.

3. Ketua Jaringan Perempuan Indonesia-Afghanistan dan Menteri Urusan Perempuan Afghanistan (H.E. Hassina Safi)

Jaringan anggota parlemen Afghanistan-Indonesia telah diinisiasi sejak kunjungan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Afghanistan yang kemudian berlanjut ke suatu MoU.



Adanya jaringan ini memberikan peluang bagi knowledge sharing antara kedua institusi terkait berbagai aspek pembangunan termasuk

upaya untuk menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian. Instabilitas yang terjadi di Afghanistan merupakan isu kritis yang tidak hanya menjadi urusan internal pemerintah Afghanistan tapi juga harus menjadi perhatian komunitas regional dan internasional.

4. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, DPR RI (Hon. Dr. Fadli Zon)

Tema diskusi ini merepresentasikan agenda bersama kita dalam mendukung stabilitas, perdamaian, dan keamanan dimana perempuan memiliki peran penting. Saat ini, perempuan memiliki peran yang semakin signifikan di dalam kehidupan manusia. Harus diakui bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi struktural dan kultural. Dari sisi struktural, perempuan seringkali kurang mendapatkan tempat dalam proses perumusan kebijakan di berbagai aspek. Pada saat yang sama, perempuan juga masih mendapatkan stigma yang kurang baik dalam pembangunan publik.

Penguatan perempuan merupakan tujuan ke-5 dalam agenda pembangunan SDGs yaitu memperkuat kesetaraan gender. Namun demikian, kesetaraan gender tidak akan bisa diraih tanpa pemberdayaan dan penguatan perempuan. Agenda kerjasama Indonesia-Afghanistan dalam penguatan perempuan harus sejalan dengan tujuan dan target SDGs ini. Sebagai anggota International Parliamentary Union (IPU) Bureau of Standing Committee for Democracy and Human Rights, perlu ditegaskan bahwa penguatan perempuan merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia.



Dalam konteks ini, anggota parlemen secara individual dan parlemen secara institutional berada di garda depan dalam upaya menghadapi persoalan ketidaksetaraan gender. Parlemen dapat menjadi pelopor gerakan untuk memperkuat perempuan sebagai katalisator proses demokratisasi. Pada sisi input, perempuan harus menjadi lebih aktif dalam berbagai partisipasi politik dan suaranya mesti lebih didengar. Pada sisi proses, perempuan harus lebih didorong untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik. Terakhir, pada sisi output, kebijakan-kebijakan di berbagai sektor harus sensitif terhadap kepentingan perempuan dan penyeteraan gender.

5. Ketua Grup Kerjasama Parlemen Afghanistan - Indonesia (Hon. Halima Sadaf Karimi)



Afghanistan sedang mengalami suatu periode yang sulit dimana masyarakat dan pemerintah sedang berjuang menegakkan perdamaian dan pencapaian hak asasi manusia. Saat ini sudah banyak perempuan, anak-anak, dan anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan oleh kelompok Taliban. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling dirugikan dan menjadi korban dari peperangan ini. Oleh karena itu, kerjasama ini diharapkan dapat membuka jalan untuk menghentikan berbagai gangguan stabilitas di Afghanistan.

6. Ketua Grup Persahabatan Parlemen Indonesia - Afghanistan (Hon. Dr. Sodik Mudjahid)

Grup Kerjasama Bilateral atau Antar Parlemen merupakan garda terdepan dalam relasi parlemen suatu negara untuk mempromosikan kepentingan nasional terhadap isu-isu regional dan internasional. Pada periode 2019-2024, Parlemen Indonesia telah membentuk Grup Kerjasama Bilateral dengan 102 negara termasuk Republik Islam Afghanistan. Secara spesifik, kita juga memiliki Komite Kerjasama Antar Parlemen antara Indonesia dan Afghanistan.

Pada situasi saat ini, pandemi Covid-19 telah memperlambat kinerja kita karena adanya berbagai pembatasan untuk berinteraksi secara langsung. Namun demikian, parlemen Indonesia berkomitmen untuk memperkuat dialog dengan parlemen Afghanistan untuk berbagi pengalaman. Kegiatan tele-conference ini diharapkan bisa menjadi titik awal untuk interaksi yang lebih intensif di masa yang akan datang dengan tatap muka secara langsung jika situasi pandemi sudah membaik.



7. Ketua Kaukus Parlemen Perempuan Afghanistan (Hon. Shinkai Karokhail)

Afghanistan saat ini sedang menghadapi momen-momen kritis dimana dunia internasional membiarkan Afghanistan berjuang sendiri mewujudkan stabilitas nasional. Namun demikian, selama dua dekade terakhir, publik Afghanistan terutama perempuan mempunyai kesempatan untuk membangun kembali negara ini dan mewujudkan

berbagai pembangunan. Peran Indonesia sangat diharapkan untuk Afghanistan karena Indonesia merupakan negara besar dengan populasi muslim terbesar di dunia. Afghanistan mendapatkan ancaman kejahatan dari berbagai sisi termasuk dari negara-negara yang berbatasan. Lebih dari 200 orang meninggal per hari akibat adanya kekerasan dan pembunuhan mulai dari politisi, jurnalis, siswa-siswi.

Afghanistan membutuhkan solidaritas dari pemerintah, parlemen, dan penduduk Indonesia. Dalam kondisi ini, dengan bantuan internasional termasuk Indonesia, diharapkan proses negosiasi dan perdamaian dengan Taliban bisa diwujudkan. Komunitas internasional harus menghindari dan menarik dukungan terhadap Taliban yang telah menjadi ancaman bagi masa depan politik Afghanistan.

b. Pemaparan

Setelah serangkaian *remarks*, maka selanjutnya adalah acara inti yaitu pemaparan dari dua orang *keynote speakers* dari Indonesia dan Afghanistan.

1. Anggota BKSAP dan Ambassador Indonesia di Women Political Leaders (Hon. Irine Yusiana Roba Putri)

Pemaparan pertama oleh Ibu Irine dengan tema "Pengalaman Indonesia dalam Penguatan Perempuan dan Komitmen Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan terutama dalam hal Pemenuhan Hak Perempuan" (*Indonesia's experience in Empowering Women and their Commitment in Supporting the Peace Process in*



Afghanistan and particularly Preserving Women Rights). Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan, maka keterwakilan perempuan dalam politik menjadi hal yang sangat krusial.

Di Indonesia, upaya-upaya peningkatan keterwakilan perempuan dan penguatan kebijakan responsif gender sudah dilakukan dengan berbagai proses. Pemerintah Indonesia telah memperkuat kerangka regulasi dengan penyusunan Grand Design untuk Keterwakilan Perempuan. Berdasarkan regulasi tersebut, target kuota 30% perempuan di parlemen telah diterapkan sejak Pemilu 2019. Kuota tersebut ditetapkan pada keterwakilan perempuan dalam pencalonan, keanggotaan dalam lembaga penyelenggara pemilihan umum. Pada pemilu 2019, terdapat kenaikan proporsi anggota parlemen perempuan dari 17,32% menjadi 21% atau sebanyak 118 dari 575 anggota parlemen.

Kebijakan pemberian kuota untuk perempuan sukses untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan tapi pada saat yang sama penguatan kapasitas perempuan juga mendesak untuk dilakukan. Tiga pilar kunci penguatan perempuan antara lain: meningkatkan akses terhadap pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan penguatan sistem pendidikan. Selain itu, pemerintah Indonesia bersama dengan DPR telah berupaya melakukan pengarusutamaan gender melalui berbagai program di berbagai sektor termasuk penganggaran yang sensitif gender.

Dalam hal proses penciptaan perdamaian, Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap proses perdamaian di Afghanistan. Peningkatan peran perempuan dalam proses perdamaian merupakan konsen utama Indonesia berkaitan dengan keterlibatannya sebagai Anggota non-Permanen PBB *Security Council* 2019-2020. Indonesia juga siap untuk memberikan berbagai support untuk perdamaian di Afghanistan.

2. Ketua Komite Urusan Perempuan Afghanistan (Hon. Naheed Farid)

Perjalanan sejarah perempuan merupakan isu yang penting di Afghanistan. Dikenal sebagai peristiwa 9/11, ini milestone bagi perkembangan politik di Afghanistan yang telah mengubah sejarah dari non demokratik menjadi negara demokrasi. Saat ini, Afghanistan merupakan negara demokratis yang telah meraih banyak pencapaian mulai dari pemenuhan hak asasi manusia, hak asasi perempuan,

kebebasan berekspresi, hak-hak minoritas, dan partisipasi politik. Saat ini perempuan Afghanistan bisa mengenyam pendidikan, bisa mengembangkan karir, dan berpartisipasi dalam ranah sosial dan politik.

Namun demikian, konflik yang terjadi saat ini dan juga kekerasan oleh kelompok Taliban dikhawatirkan akan merusak tatanan demokrasi yang saat ini sudah berjalan. Banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan, pemenjaraan, dan pembunuhan tentunya sangat merusak prestasi dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Dalam kondisi ini, dukungan dari publik dan terutama perempuan sangat dibutuhkan untuk mencegah Afghanistan jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Selanjutnya, dukungan dari komunitas internasional terutama negara-negara Islam sangat dibutuhkan dalam upaya menghentikan kekerasan dan memajukan kesejahteraan di Afghanistan.

c. Diskusi

Setelah pemaparan oleh dua pembicara utama, selanjutnya moderator membuka waktu diskusi terbuka. Terdapat 7 peserta yang memberikan komentar dan tanggapan terhadap substansi diskusi ini (3 peserta dari Indonesia, 3 peserta dari Afghanistan, dan 1 yaitu Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia).

1. Hon. Dyah Roro Esti Widaya Putri (Indonesia)

Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia telah mencapai angka 21%. Capaian ini sangat penting bagi perbaikan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Keterwakilan ini juga sangat signifikan bagi proses perumusan kebijakan seperti misalnya dalam hal energi terbarukan yang saat ini sedang dibahas. Khususnya dari Kaukus Perempuan Indonesia sangat mengharapkan adanya follow-up dari kegiatan ini sehingga Indonesia bisa membantu penguatan perempuan di Afghanistan.

2. Hon. Bibi Gulalai Muhammadi (Afghanistan)

Indonesia merupakan negara sahabat yang diharapkan bisa memberikan support terhadap publik dan perempuan Afghanistan dalam menghadapi teror dari Taliban.

3. Hon. Puteri Anetta Komarudin (Indonesia)

Perempuan merupakan salahsatu kunci dalam upaya mewujudkan perdamaian sehingga sangat perlu ditempatkan sebagai tokoh kunci dalam proses perundingan. Keterlibatan perempuan merupakan hak hidup bagi perempuan. Dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, Parlemen mempunyai peran penting dalam hal penganggaran dan perumusan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Saat ini, perempuan di Indonesia telah dilibatkan sebagai bagian dari upaya untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dengan berbagai program.

4. Hon. Habiba Danis (Afghanistan)

Saat ini Afghanistan sedang menghadapi situasi sulit. Fondasi sosial dan ekonomi Afghanistan rusak akibat adanya kelompok teroris. Sekolah dan fasilitas publik terpaksa tutup. Pada saat yang sama, banyak sekali korban terbunuh oleh Taliban. Anggota parlemen perempuan sangat konsen terhadap upaya menghentikan kekerasan ini. Keterlibatan dan dukungan Indonesia sangat dibutuhkan.

5. Hon. Andi Yuliani Paris (Indonesia)

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat perempuan di Afghanistan patut diapresiasi. Sebagai contoh pada tahun 2002, komunitas internasional terutama Amerika Serikat telah meletakkan dasar berupa rule of law untuk penguatan politik representasi perempuan dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia. Pertanyaannya adalah bagaimana progress dari fondasi ini?

6. Hon. Rahima Jami (Afghanistan)

Afghanistan sangat apresiasi keterlibatan Indonesia dalam membangun rumah sakit Covid dan Islamic Center (masjid dan sekolah) di Kabul. Diharapkan Indonesia menjadi tuan rumah dalam perundingan dan proses negosiasi.

7. Hon. Huma Ahmadi (Afghanistan)

Isu yang saat ini menjadi konsen anggota parlemen Afghanistan adalah banyaknya korban kekerasan terutama anak muda, perempuan, dan anak-anak. Dalam kondisi ini, kami mengharapkan dukungan negara-negara Islam termasuk Indonesia dan Arab Saudi dalam menghentikan kekerasan ini dengan menekan kelompok Taliban.

8. Fauzullah Zaki Ibrahim (Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia)

Beberapa langkah sudah dilakukan untuk memperkuat relasi antara Indonesia dan Afghanistan. Hubungan antar parlemen kedua negara sangat dekat dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Relasi ini memberikan konstruksi positif. Afghanistan sangat membutuhkan dukungan internasional untuk menghentikan kekerasan dan peperangan serta untuk menghadirkan perdamaian dan keamanan di Afghanistan. Komitmen dari Parlemen Indonesia sangat signifikan dalam berbagai proses negosiasi dalam upaya menciptakan perdamaian di Indonesia.

III. KESIMPULAN

Moderator kemudian memberikan kesimpulan dari jalannya teleconference ini. Kita harus akui bahwa perempuan masih dihadapkan pada berbagai tantangan terutama dari aspek struktural dan kultural. Namun demikian, perempuan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memerikan kontribusinya terhadap sektor ekonomi, politik, keamanan dan sektor lainnya.

Pemberdayaan perempuan merupakan agenda besar dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan menghilangkan semua diskriminasi terhadap perempuan. Hal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak-hak asasi manusia dan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan demokrasi baik di Indonesia maupun Afghanistan. Selain itu, penguatan perempuan juga tidak terlepas dari agenda pembangunan global (SDGs). Inklusi perempuan dalam proses pembangunan termasuk proses perdamaian bukan hanya pemenuhan kebijakan afirmatif tapi juga bagian dari pengakuan terhadap martabat manusia. Dalam mencapai upaya tersebut, maka penguatan perempuan melalui penguatan kapasitas dan pemberian kesempatan di ranah publik merupakan hal yang sangat mendesak.

Indonesia dan Afghanistan memiliki kesamaan kepentingan dan tanggungjawab untuk merealisasikan misi ini dalam mempererat hubungan kedua negara. Melalui kegiatan teleconference ini, Indonesia akan mengambil keuntungan dari berbagai aktivitas seperti saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan komitmen bersama untuk membangun negara ini. Selanjutnya, diharapkan bahwa diskusi ini bisa direalisasikan ke berbagai kegiatan yang lebih kongkrit. Beberapa agenda kolaborasi antara parlemen Indonesia dan Afghanistan dapat dilakukan melalui diskusi yang lebih intensif, berbagai pengetahuan, peningkatan kapasitas bersama untuk perempuan, serta pemecahan masalah bersama.

IV. PENUTUP

Laporan ini dilengkapi dengan :

a. Foto-foto Kegiatan

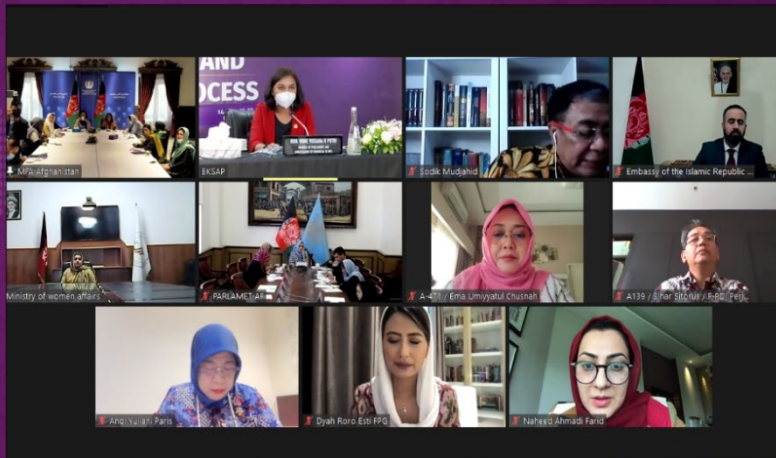




The Committee for Inter-Parliamentary Cooperation
The House of Representatives of the Republic of Indonesia



The Committee for Inter-Parliamentary Cooperation
The House of Representatives of the Republic of Indonesia



Wednesday,
23rd June 2021



14.00 – 15.30
(GMT +7)



b. Tautan

- Post Instagram BKSAP :
https://www.instagram.com/p/CQfRJCbHy9z/?utm_medium=copy_link
- Liputan berita di website dpr :
<https://dpr.go.id/berita/detail/id/33542/t/Perempuan+Punya+Peran+Penting+Dalam+Mendukung+Proses+Perdamaian>
- Rekaman Livestreaming acara :
<https://youtu.be/gcxNXLvK2ko>

Demikianlah pokok – pokok Laporan Pelaksanaan Indonesia – Afghanistan Virtual Teleconference: “*Empowering Women and Supporting Peace Process*” pada 23 Juni 2021 di Gedung Nusantara III Lt. 6. Atas nama delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada delegasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi diplomasi demi bangsa dan negara Indonesia.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 29 Juni 2021

Moderator/
Wakil Ketua BKSAP

ttd

Dr. Mardani Ali Sera
A-442